

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH DAN KEKAYAAN PEMERINTAH
DAERAH TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN
(Studi pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2018)**

**Devita Kurniawati ¹⁾
Aris Eddy Sarwono ²⁾
Sunarti ³⁾**

^{1, 2, 3)} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta
e-mail: ¹⁾ devitakurniawati23@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of size of local government and wealth of local government on the level of disclosure of Local Government Finance Report. The sample in this study amounted to 140 District/ City of Local Government Finance Report in Central Java during the years 2015-2018, purposive sample method using path analysis. The analysis technique used is determine the estimation of panel data regression models, classic assumption test, multiple linear regression, t-test, f-test and test the coefficient of determination, with using E-views 10. The results showed that the variable of size of the local government have no effect on the level of disclosure of Local Government Finance Report, while the wealth of local government have effect level of disclosure of Local Government Finance Report.

Keyword: *Size of Local Government, Wealth of Local Government*

PENDAHULUAN

Lembaga-lembaga sektor publik mempunyai tuntutan yang besar dari masyarakat untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik berupaya dengan melakukan tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Public Government* (GPG). GPG yang baik berkaitan dengan bagaimana pemerintah mampu melaksanakan otonomi di daerahnya. Berlakunya otonomi daerah berarti daerah memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam hal ini, pemerintah daerah tidak lepas dari tanggung jawab dalam mengelola keuangan daerahnya. Pemerintah sebagai pihak dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, bertanggung jawab untuk memberikan informasi aktivitas yang telah dilakukan dan laporan keuangan pemerintah yang menunjukkan kinerja finansial pemerintah kepada masyarakat luas secara terbuka dan transparan agar tercipta pemerintahan yang bersih, sehingga pemerintah mempunyai peran penting untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas publik.

Pada Pasal 31 Ayat 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), berupa laporan keuangan yang berisi Neraca, Laporan Realisasi APBD (LRA), Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. Selain itu, pada Bab Penjelasan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa penyampaian laporan keuangan pemerintah harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sebagai upaya dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah laporan realisasi pertanggung jawaban atas laporan anggaran yang telah di hasilkan dari realisasi dana daerah yang telah terlaksana. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Laporan keuangan perlu dilampiri pengungkapan (*disclosure*) mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan (Mardiasmo, 2002: 160). Pengungkapan dalam laporan keuangan ada dua yaitu pengungkapan wajib (*Mandatory Disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*Voluntary Disclosure*). Pengungkapan minimum yang diatur dalam standar akuntansi yang berlaku adalah pengungkapan yang bersifat wajib (*Mandatory Disclosure*). *Mandatory Disclosure* merupakan pengungkapan informasi yang wajib dikemukakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, pengungkapan wajib bagian dari SAP yang bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Pengungkapan dan penjelasan beberapa item yang disajikan dalam lembar muka laporan keuangan dapat disajikan dalam (CaLK). Pengungkapan laporan keuangan bersifat wajib (*Mandatory Disclosure*) yang sesuai dengan SAP yang akan dijadikan dasar dalam penelitian ini.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada LKPD tahun 2015-2018 yang dilaporkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah tingkat Kabupaten mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebesar 84% dan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebesar 16%, sedangkan pada tingkat Kota mendapatkan opini WTP sebesar 75% dan opini WDP sebesar 25%. LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2015-2018, meskipun LKPD mengalami peningkatan tetapi BPK masih menemukan catatan terkait Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-perundangan. Catatan yang ditemukan oleh BPK tersebut, dapat mempengaruhi seberapa tingkat pengungkapan LKPD. Tentunya pemerintah daerah harus memperbaiki kinerjanya agar kedepannya pengungkapan dan penyajian pada laporan keuangan dapat disajikan sesuai dengan SAP.

Ukuran Pemerintah Daerah diukur dengan total aset, merupakan sumber daya yang digunakan entitas dalam melakukan kegiatan operasional entitas. Kabupaten atau kota yang memiliki total aset yang lebih besar maka akan lebih kompleks dalam mengelola dan menjaga asetnya. Simbolon dan Kurniawan (2018) mengatakan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran yang lebih besar akan memiliki tekanan yang besar pula dari publik untuk menyajikan laporan keuangannya secara lengkap. Penelitian Waliyyani dan Mahmud (2015), Girsang dan Yuyetta (2015), Murdayanti, dkk (2015) dan Syoftia (2016) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh tingkat pengungkapan LKPD. Sedangkan hasil penelitian Simbolon dan Kurniawan (2018), Marliani, dkk (2018), dan Maulana dan Handayani (2015) menunjukkan ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Kekayaan Daerah diprosikan dengan total Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan bagian dari sumber penghasilan yang diperoleh di suatu daerah, misalnya melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Nurtari, dkk (2016) mengungkapkan bahwa semakin tinggi tingkat kekayaan yang dimiliki pemerintah daerah maka semakin memberikan tekanan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan secara lengkap. Hasil penelitian yang dilakukan Simbolon dan Kurniawan (2018), Marliani, dkk (2018) dan Syoftia (2016) menemukan bahwa kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD, namun hasil yang lainnya ditemukan oleh Nurtari, dkk (2016) dan Nazaruddin dan Sita (2019) bahwa kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Berdasarkan temuan dan fenomena yang telah diuraikan diatas dapat dilihat adanya kontradiksi atau perbedaan antara temuan dengan hasil-hasil penelitian terdahulu, sehingga

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah dan Kekayaan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2018).

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD. 2) Untuk menganalisis pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Teori utama yang mendasari penelitian ini adalah teori agensi. Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori keagenan menyatakan bahwa hubungan antara dua pihak yang terikat dalam perjanjian dan terdiri dari agen yaitu pihak yang diberi tanggung jawab serta pihak prinsipal yang memberikan tanggung jawab. Sehubungan dengan entitas sektor publik di Indonesia dengan sistem politik yang demokratis, anggota masyarakat memilih pemimpin untuk menangani kekayaan nasional dan regional. Presiden atau pemimpin lokal adalah agennya diharapkan bekerja untuk kepentingan masyarakat sebagai *principal* (Laupe, dkk, 2018).

Pemerintah Daerah di Indonesia

Berdasarkan pada Pasal 1 Ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap daerah dipimpin oleh kepala Pemerintah Daerah yaitu kepala daerah. Gubernur yaitu kepala daerah untuk Provinsi, Bupati untuk kepala daerah Kabupaten dan Walikota untuk kepala daerah Kota.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pada dasarnya laporan keuangan merupakan asersi pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi tujuannya untuk pengambilan keputusan dan untuk mewujudkan akuntabilitas entitas pelaporan. Utamanya, laporan keuangan digunakan untuk membandingkan antara realisasi belanja, transfer, pendapatan dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai bagaimana kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pada entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatan entitas pelaporan terhadap peraturan perundang-undangan. LKPD merupakan hasil konsolidasi dari laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertugas menyusun LKPD.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

SAP merupakan prinsip-prinsip yang ada di akuntansi diterapkan saat menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Pada dasarnya, SAP mengatur perihal informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. SAP juga digunakan pihak yang menggunakan laporan keuangan termasuk legislatif dalam memahami informasi yang disajikan di laporan keuangan tersebut, sedangkan BPK sebagai auditor eksternal menggunakan SAP untuk kriteria dalam melakukan audit.

Pengungkapan pada Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan

Menurut Suparno dan Nanda (2016) menyatakan bahwa jenis pengungkapan ada dua yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*).

Pengungkapan wajib kaitannya dengan pemerintahan di Indonesia, mengacu terhadap informasi yang diungkapkan dalam LKPD yang berpedoman pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. pengungkapan sukarela, mengungkapkan informasi yang tidak diwajibkan oleh peraturan yang telah ditetapkan, namun entitas mengungkapkan hal tersebut karena pemakai laporan keuangan menganggap informasi yang diungkapkan relevan sesuai dengan kebutuhannya. Pengungkapan sukarela dalam LKPD disajikan didalam CaLK berupa informasi tambahan.

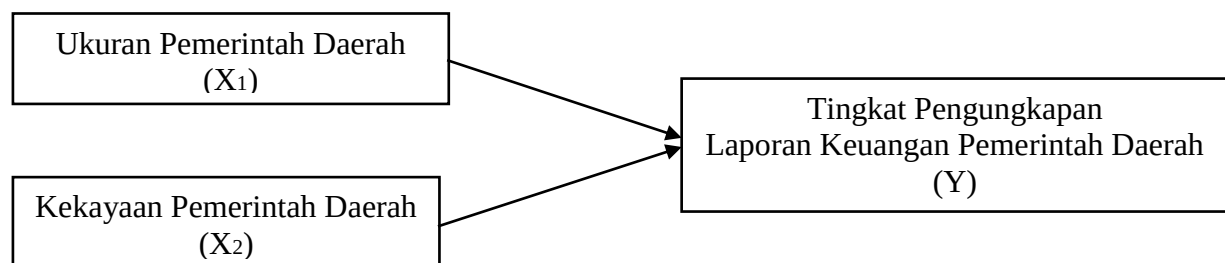
Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran suatu entitas merupakan suatu skala entitas dapat dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya dengan menggunakan tolak ukur. Total aset digunakan sebagai proksi ukuran pemerintah daerah karena aset merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki pemerintah. Pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar dituntut mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangannya sebagai wujud dari akuntabilitas publik melalui pengungkapan informasi yang lebih banyak dalam laporan keuangan.

Kekayaan Pemerintah Dearah

Kekayaan pemerintah daerah menggambarkan tingkat kemakmuran suatu daerah. Kekayaan daerah merupakan kinerja pemerintah sebagaimana ditunjukkan kemakmuran daerah atau jumlah PAD. Berdasarkan pada Pasal 1 Ayat 18 UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah bahwa PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber PAD diantaranya: pajak daerah, laba dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), retribusi daerah dan PAD lain-lain yang sah.

Model dan Hipotesis Penelitian



Gambar 1. Model Penelitian

Berdasarkan model diatas maka hipotesis yang ingin dibuktikan dalam penelitian ini adalah:

H₁: Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

H₂: Kekayaan Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD.

Definisi Operasional Variabel

Tingkat Pengungkapan LKPD

Pada penelitian ini tingkat pengungkapan LKPD diukur dengan sistem *scoring*. Sistem *scoring* adalah sistem memberikan skor dengan membuat daftar *checklist* pengungkapan wajib berdasarkan SAP pada PP Nomor 71 Tahun 2010. Tiap item pengungkapan yang diungkapkan dalam LKPD diberikan skor 1 (satu) dan tiap item pengungkapan yang tidak ada dalam LKPD diberi skor 0 (nol). Penelitian ini menggunakan item-item pengungkapan yang terdapat dalam

PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP yang tertuang dalam PSAP Nomor 5 sampai dengan PSAP Nomor 9 ditambah 7 item pengungkapan wajib dalam CaLK. Berdasarkan penelitian Simbolon (2018) tingkat pengungkapan LKPD dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Disclosure (DISC) = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{\text{Total item yang harus diungkapkan}} \times 100\%$$

Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah diproksikan menggunakan total aset. Total aset digunakan sebagai proksi ukuran pemerintah daerah karena aset merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai pemerintah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Maulana (2015), ukuran pemerintah daerah diproksikan dengan total aset dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Pemerintah Daerah (SIZE)} = \text{Ln Total Aset}$$

Kekayaan Pemerintah Daerah

Kekayaan pemerintah daerah diproksikan dengan PAD. PAD digunakan karena merupakan satu-satunya sumber keuangan yang berasal dari pemerintah daerah itu sendiri. Menurut Marliani, dkk (2018) kekayaan pemerintah daerah diukur dengan rumus:

$$\text{Kekayaan Pemerintah Daerah (WEALTH)} = \text{Ln Total PAD}$$

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini menggunakan metode sensus dengan data Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2015-2018, yang sumbernya dari BPK Provinsi Jawa Tengah.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data:

1. Data Kuantitatif

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Data kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2015-2018, yang diperoleh dari BPK Provinsi Jawa Tengah.

2. Data Kualitatif

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka. Data Kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa penjelasan mengenai opini pada Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2015-2018, yang diperoleh dari BPK Provinsi Jawa Tengah.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini diambil dari Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2015-2018 yang diperoleh dari BPK Provinsi Jawa Tengah.

Populasi dan Sampel

Menurut Arikunto (2013: 173) populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan populasi berupa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 daerah yang terdiri dari 6 Kota dan 29 Kabupaten.

Arikunto (2013: 174) menyatakan bahwa sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Proses pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria tertentu dan beberapa pertimbangan. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun anggaran 2015-2018 yang telah diaudit oleh BPK.
2. LKPD yang mempunyai data lengkap untuk pengukuran variabel:
Menyediakan empat komponen utama dalam LKPD yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Dokumentasi

Metode Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini dalam mengumpulkan data. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menghitung data yang berhubungan dengan penelitian. Pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder bersumber dari dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan pada LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2018.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, meliputi artikel publikasi ilmiah yang relevan, buku-buku dan surat kabar.

ANALISI DATA DAN PEMBAHASAN

Hasil Pemilihan Model Data

Tabel 1. Hasil Uji Penentuan Estimasi Model Regresi Data Panel

Nama uji	Hasil uji	Kesimpulan
Uji Chow	Nilai Probability 0,0000 < 0,05	<i>Fixed Effect Model</i> lebih tepat digunakan
Uji Hausman	Nilai Probability 0,8134 < 0,05	<i>Random Effect Model</i> lebih tepat digunakan
Uji Lagrange Multiplier	Nilai Probability 0,0000 < 0,05	<i>Random Effect Model</i> lebih tepat digunakan

Sumber: Data diolah tahun 2020

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas terhadap 140 observasi menunjukkan nilai *probability Jarque-Bera* kurang dari nilai signifikan ($0,001472 < 0,05$), maka menunjukkan bahwa semua variabel memiliki distribusi tidak normal.

Menurut Dielman (1961) menyatakan tentang *Central Limit Theory*, teori ini menyatakan bahwa untuk sampel yang besar lebih dari 30 ($n \geq 30$) distribusi sampel dianggap normal. Hal tersebut menunjukkan bahwa walaupun dari pengujian asumsi klasik berupa pengujian normalitas

menunjukkan bahwa data terdistribusi tidak normal namun karena sampel lebih dari 30 maka data tersebut dianggap normal sesuai dengan *Central Limit Theory*.

Uji Multikolineritas

Pengujian multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang dilakukan ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolineritas

Variabel	SIZE	WEALTH	OPINI
SIZE	1,000000	0,686026	0,196820
WEALTH	0,686026	1,000000	0,040124
OPINI	0,196820	0,040124	1,000000

Sumber: Data diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai korelasi antar variabel lebih kecil dari 0,8 ($r < 0,8$) yang berarti model tidak mengandung masalah multikolineritas atau asumsi tidak terjadi multikolineritas dalam model terpenuhi.

Uji Autokorelasi

Penelitian ini menggunakan uji autokorelasi dengan *Durbin Watson* (DW). Hasil uji DW dalam penelitian ini menghasilkan nilai 0,686651. Nilai statistik uji DW menunjukkan kurang dari 1,10 ($0,686651 < 1,10$). Dapat disimpulkan bahwa terjadi autokorelasi dalam penelitian ini.

Pada data penelitian ini terjadi pelanggaran autokorelasi, tetapi menurut Iqbal (2006) menyatakan bahwa uji autokorelasi hanya wajib dilakukan pada model regresi linear data *time series*. Uji autokorelasi hanya akan terjadi pada model regresi linear data *time series*. Pada data *cross section* ataupun data panel tidak wajib lolos uji autokorelasi.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas mendeteksi ada tidaknya masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini, dengan menggunakan uji *white*.

Tabel 3. Hasil Uji Heterokedastisitas

<i>Obs*R-squared</i>	<i>Prob Chi Square</i>
9,633830	0,0219

Sumber: Data diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai *Prob Obs*R-squared* lebih kecil dari nilai signifikan ($0,0219 < 0,05$). Dapat disimpulkan bahwa terjadi heterokedastisitas pada model regresi. Supaya tidak terjadi heterokedastisitas, (Bawono dan Shina, 2018) menyatakan bahwa cara untuk mengatasi heterokedastisitas dengan menggunakan metode kuadrat kecil terboboti (*Weighted Least Square/ WLS*).

Setelah dilakukannya metode WLS, kemudian dilakukan pendektasian lagi dengan uji *white*. Hasil pengujian sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas (Metode WLS)

<i>Obs*R-squared</i>	<i>Prob Chi Square</i>
15,44315	0,0511

Sumber: Data diolah tahun 2020.

Hasil pengujian heterokedastisitas menggunakan metode WLS disertai uji *white*, diketahui pada tabel di atastertera nilai *Obs*R-squared* dan *Prob Chi Square*. Nilai *Prob Chi Square* lebih dari nilai signifikan ($0,0511 > 0,05$). Setelah dilakukannya perubahan metode pengujian, dapat disimpulkan bahwa model regresi telah terjadi keadaan yang homokedastisitas dan tidak lagi terjadi penyimpangan asumsi heterokedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi Linear Berganda untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Coefficient	t-statistic	Prob.
C	-64,99350	-1,641874	0,1029
Size	0,90837	0,562504	0,5747
Wealth	3,37477	2,968136	0,0035
R ²	0,100640		
Adj.R ²	0,007510		
F-stat	7,665256		
Prob. (F-stat)	0,000699		

Sumber: Data diolah tahun 2020

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan garis regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + 0,908371X_{1it} + 3,374775X_{2it} + e_{it}$$

Intepretasi dari persamaan regresi tersebut adalah:

- b_1 : 0,908371. Pengaruh variabel ukuran pemerintah daerah (X_1) terhadap tingkat pengungkapan LKPD (Y) tidak berpengaruh positif, artinya bahwa semakin besarnya total aset tidak mendorong pemerintah daerah meningkatkan tingkat pengungkapan laporan keuangannya.
- b_2 : 3.374775. Pengaruh variabel kekayaan pemerintah daerah (X_2) terhadap tingkat pengungkapan LKPD (Y) berpengaruh positif, artinya semakin tinggi kekayaan pemerintah daerah maka semakin memberikan tekanan kepada pemerintah untuk melakukan pengungkapan secara lengkap pada LKPD.

Uji statistik t

1. Pengujian pengaruh ukuran pemerintah daerah (X_1) terhadap tingkat pengungkapan LKPD (Y).

Berdasarkan nilai probabilitas variabel ukuran pemerintah daerah (*SIZE*) mempunyai nilai probabilitas $0,5747 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak berarti tidak ada pengaruh variabel ukuran pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hipotesis 1 tidak terbukti kebenarannya.

2. Pengujian pengaruh kekayaan pemerintah daerah (X_2) terhadap tingkat pengungkapan LKPD (Y).

Berdasarkan nilai probabilitas variabel kekayaan pemerintah daerah mempunyai nilai probabilitas $0,0035 > 0,05$, maka H_0 ditolak berarti tida pengaruh variabel kekayaan pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hipotesis 2 terbukti kebenarannya.

Uji Statistik F (Uji Kelayakan Model)

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai Prob (F-statistic) mempunyai nilai *prob* (F-statistic) yaitu $0,000699 < 0,05$ yang artinya bahwa model regresi pada penelitian ini layak untuk digunakan.

Uji Koefisien Determinasi

Hasil analisis menunjukkan nilai *adjusted R-squared* bernilai 0,087510 berarti interprestasinya 8,75% variasi dari variabel indenpenden dan sisanya 91,25% dijelaskan oleh variabel lainnya. Koefisien determinasi adalah sebesar 0,087510. Angka ini menjelaskan bahwa 8,75% ukuran pemerintah daerah dan kekayaan pemerintah daerah mempengaruhi tingkat pengungkapan LKPD, sedangkan sisanya 91,25% tingkat pengungkapan LKPD dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Hasil analisis uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah mempunyai nilai probabilitas $0,5747 > 0,05$ maka H_0 diterima, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan ukuran pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Pada hipotesis pertama yang menyatakan bahwa adanya pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD pada penelitian ini tidak terbukti.

Aset yang dimiliki pemerintah daerah biasanya jumlahnya besar, tetapi tidak diikuti dengan pencatatan yang benar. Total aset yang disajikan dalam neraca, komponen aset tetap biasanya memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan total aset lancar. Jumlah aset tetap yang besar ini akan diikuti oleh penyajian dan pencatatan yang lengkap atas aset-aset tetap yang dimiliki pemerintah, tetapi pada kenyataannya aset tetap sering menjadi masalah yang menimbulkan adanya temuan-temuan pada auditor pada saat pemeriksaan dikarenakan perhitungan hingga pengakuan aset tanpa adanya sertifikat yang mendukung.

Hasil penilitan ini sama dengan penelitian Waliyyani dan Mahmud (2015), Girsang dan Yuyetta (2015), Syoftia, dkk (2016) dan Murdayani, dkk (2015). Peneliti Syoftia, dkk (2016) menyatakan bahwa besarnya total aset tidak mempengaruhi suatu daerah untuk melakukan tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan. Menurut Yuyetta (2015), menyatakan bahwa semakin besar nilai aset yang dimiliki tidak mendorong pemerintah daerah meningkatkan tingkat pengungkapan laporan keuangannya.

2. Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Hasil analisis uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah mempunyai nilai probabilitas $0,0035 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti ada pengaruh yang signifikan ukuran pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Pada hipotesis kedua yang menyatakan bahwa adanya pengaruh kekayaan pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD pada penelitian ini terbukti kebenarannya. Penelitian ini menggunakan kekayaan pemerintah daerah yang diprosikan dengan total PAD.

Pengaruh total PAD terhadap tingkat pengungkapan LKPD dikarenakan jumlah PAD yang semakin besar, maka dari itu akan memberikan tekanan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan sesuai dengan SAP. Adanya tuntutan transparansi dari masyarakat dalam pengelolaan PAD yang telah diterima oleh pemerintah daerah yang berasal dari berbagai pendapatan wajib pajak, retribusi dan lain-lain berasal dari wajib pajak di daerah masing-masing, sehingga pemerintah daerah harus mengungkapkan dalam LKPD. Masyarakat selaku pembayar pajak dan retribusi tentu ingin mendapatkan informasi tentang penggunaan dana mereka.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh peneliti Nurtari, dkk (2016) dan Nazaruddin dan Sita (2019). Peneliti Nurtari, dkk (2016) menyatakan bahwa semakin tinggi kekayaan pemerintah daerah maka semakin memberikan tekanan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan secara lengkap.

KESIMPULAN

Penelitian ini menguji pengaruh ukuran pemerintah daerah dan kekayaan pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Penelitian ini menggunakan sampel 140 LKPD di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2018. Rata-rata tingkat pengungkapan LKPD. Rata-rata tingkat pengungkapan LKPD tahun 2015-2018 sebesar 50,77%. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pengungkapan wajib pemerintah daerah Jawa Tengah masih rendah dan pemerintah daerah belum sepenuhnya menyajikan semua informasi yang seharusnya diungkapkan dalam laporan keuangan. Ukuran pemerintah daerah Jawa Tengah yang diprosikan dengan total aset mempunyai nilai rata-rata 28,83607 (Rp 4.037.879.879.387,01). Pada variabel kekayaan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah mempunyai nilai rata-rata 26,54050 (Rp 400.258.219.332,88).

Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2018. Hal ini ditunjukkan dari nilai koefisien sebesar 0,908371 dan nilai *probability* sebesar 0,5747. Artinya H_1 ditolak.

Kekayaan pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2018. Hal ini ditunjukkan dari nilai koefisien sebesar 3,373775 dengan nilai *probability* sebesar 0,0035. Koefisien pada variabel kekayaan pemerintah daerah sebesar 3,373775 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 3,4% PAD, akan diikuti oleh peningkatan tingginya tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya H_2 diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta
- Chariri, Anis dan I Ghazali. 2007. *Teori Akuntansi, Edisi ke tiga*. Universitas Diponegoro
- Dielman. 1961. *Applied Regression Analysis For Business and Economics*. PWS KENT Publishing Company.
- Girsang, Heri Atapson V dan Etna Nur Afri Yuyetta. 2015. Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol. 04, No. 04. 1-11.
- Gujarati, Damodar. 2012. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Salemba Empat. Jakarta.
- Indriantoro, Nur, & Supomo, Bambang. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta
- Iqbal, Muhammad. 2015. Regresi Data Panel (2) Tahap Analisis. Perbanas Institue. <https://dosen.perbanas.id/regresi-data-panel-2-tahap-analisis/>. Diakses tanggal 20 Februari 2020.
- Jensen, M.C., & Meckling, W.H. (1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*. *Journal of financial economics*. Vol. 3, No. 4. 305-360.
- Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/K/IXIII.2/6/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja.
- Laupe, Supriadi, Fadli Moh. Saleh, Ridwan, dan A Mattulada. 2018. *Factors Influencing The Financial Disclosure Of Local Governmental in Indonesia*. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*. Vol. 22, Issue 3. 1-9
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik Edisi IV*. CV ANDI OFFSET. Yogyakarta.

- Marliani, Meli, Moh. Amin dan M. Cholid Mawardi. 2018. Pengaruh Karakteristik Pemerintah, Kompleksitas, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-JRA*. Vol. 07, No. 10. 37-51.
- Maulana, Candra dan B Dwi Handayani. 2015. Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas Pemerintah Daerah, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*. Vol. 04, No. 04. 1-11.
- Murdayanti, Yunika, E Gurendrawati, dan Y Febrian Iyabu. 2015. *Analysis of Factors Affecting Level of Disclosure in Regional Sector's Financial Statements. Review of Integrative Business & Economic Research*. Vol. 4, No. 1. 253-261.
- Nachrowi, D Nachrowi dan Usman, Hardius. 2006. Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan, dilengkapi Teknik Analisis dan Pengolahan Data dengan SPSS dan *Eviews*. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Naopal, Fikrinah, S Rahayu, dan S Priyandani Yudowati. 2017. Pengaruh Karakteristik Daerah, Jumlah Penduduk, Temua Audit, dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Assets*. Vol. 7, No. 1. 56-68.
- Nazaruddin, Ietje dan Yuni Yanti Abi Sita. 2019. *The Effects of Government Characteristics, Complexity, Audit Findings, and Audit Opinions on the Level of Provincial Government Financial Statement Disclosures in Indonesia. Advances in Economics, Business and Management Research*. Vol. 102. 85-90.
- Nurtari, Almanita, S Fadilah, dan K Nucholish. 2016. Pengaruh Karakteristik dan Kompleksitas Pemerintah Daerah Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan. *Prosiding Akuntansi*. Vol. 2, No. 1. 263-270.
- Putri, Winda Meiliza dan Fefri Indra Arza. 2019. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. Vol.1, No.3. 1111-1130.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan diakses 30 November 2019.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan diakses 9 Desember 2019.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diakses 24 November 2019.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara diakses 24 November 2019.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diakses 24 November 2019.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diakses 24 November 2019.
- Simbolon, Henny Agnesia Uliarta, dan Christophorus Heni Kurniawan. 2018. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan di Seluruh Indonesia. *Modus*. Vol. 30, No. 1. 54-70.
- Suparno dan R Nanda. 2016. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, Diferensiasi Fungsional Dan Spesialisasi Fungsional Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 3, No. 2. 105-118.
- Syoftia, Eljra, Dwi Fitri Puspa, dan Ethika. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah, Opini Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib dalam Laporan keuangan Pemerintah Daerah (Study pada LKPD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Fakultas Ekonomi Bung Hatta*. Vol. 9, No.2. 1-14.

- Waliyyani, M Ghaniyyu, dan A Mahmud. 2015. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*. Vol. 4, No. 2. 1-8.
- Widarjono, Agus. 2007. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi Edisi Kedua*. Ekonisia. Yogyakarta.
- Winarno, Wing Wahyu. 2009. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.